

ISSN 2089-4112



SERBA-SERBI

Jurnal Ilmiah

Focus Magister Administrasi

PARADIGMA PELAYANAN PUBLIK

Dalam Persaingan Global



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA (UPMI) MEDAN**

VOLUME 4* NOMOR 3* DESEMBER 2015

Jurnal Ilmiah Focus Magister Administrasi
Volume 4. Nomor 3. Desember 2005

Jurnal Ilmiah Focus Magister Administrasi Program Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Terbit tiga kali setahun setiap bulan Februari, Juli dan Desember. Jurnal Focus Magister Administrasi berperan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah –masalah administrasi, diantaranya administrasi pemerintahan; administrasi pendidikan; administrasi bisnis, dan kebijakan publik. Jurnal ini memuat artikel hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori, serta pembahasan kepustakaan, baik yang ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing.

PENANGGUNG JAWAB
Rektor UPMI Medan

PIMPINAN UMUM/ WAKIL
Dr. H. Ali Mukti Tanjung, Drs.,SH.,MM

KETUA REDAKTUR
Dr. H. Didin Muhafidin, S.IP.,M.Si

ANGGOTA REDAKTUR
Ahmad Karim, SE.,MM
Drs. El Azhari

SEKRETARIS
Mahyudin Situmeang, S.Sos.,M.Si

BENDAHARA
Drs. Saimun

STAF AHLI / PENYUNTING
Dr. H. Amin Ibrahim, Drs.,MA
Dr. H. Deddy Pandji Santosa, S.Sos.,M.Si
Dr. H. Gunawan Undang, Drs.,M.Si
Dr. Rhiza Zaenudin Ahmad,ST.,M.Si

ALAMAT REDAKSI/ PENERBIT
Kampus I UPMI : Jl. Teladan No. 15 Medan
Telp. (061) 7362927 - (061) 7365650
Fax : (061) 7362927
Website : <http://www.upmi.ac.id>
<http://www.dpsantozs.wix.com/jurnal-ilmiah-upmi>
E-mail : focusilmuadm@upmi.ac.id
sdrdeddyp@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

1. Kompetensi Profesi Sekretari, Tantangan Dan Peluang Di Era Globalisasi

Oleh : Mulyaningsih

2. Proses Kebijakan Merupakan Proses Politik Dan Teknik Pelaksanaannya.

Oleh : Deddy Pandji Santosa

3. Implementasi Filosofi Pancamarga Dalam Koordinasi Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan

(Studi kasus di Pemerintah Kabupaten Bandung)

Oleh : Dr. Drs, Engkus, SE., M.Si.

4. Analisis Komparatif Tentang Peraturan Perpajakan Pusat Dan Daerah

(Studi Kasus Tentang Perda Perparkiran Kabupaten Sumedang)

Oleh : Nanang Suparman

5. Analisis Hierarki Proses Dalam Transportasi Mudik Di Indonesia

(Telaah Struktur dalam Manajemen Transportasi Mudik Lebaran Di Indonesia)

Oleh : Adang Djatnika Effendi

6. *Corporate Social Responsibility (CSR)* Berbasis Pengembangan Sumber Daya Manusia

Oleh :

Husen Saepul Anwar

**7. Meningkatkan Profesionalisme Guru Melalui Supervisi
Klinis Dengan Pendekatan Lesson Study**

(Studi Kasus :Di SMP Negeri 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas
Utara)

Oleh : Mastihari Siregar, S.Pd

**8. Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Materi Rangka
Manusia Dengan Menggunakan Model Pakem**

(Studi Kasus: Kelas IV SD N 101370 Batang Pane II Kabupaten Padang Lawas
Utara)

Oleh : Tirohipah Siregar

**9. Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Pada Materi
Mean, Median dan Modus Dengan Menggunakan Model
Snowball Throwing**

(Studi Kasus: Kelas IX SMP N 5 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas
Utara)

Oleh : Sondang Butar- Butar

**10. Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Pada
Materi Fakta Dan Opini Dengan Menggunakan Model
Pakem**

(Studi Kasus: Kelas IX SMP N 5 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas
Utara)

Oleh : Flora Sianturi

**11. Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Materi Sinonim
Dan Antonim Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Dengan
Model Teams Games Tournament (TGT)**

(Studi Kasus: Kelas VII SMP Negeri I Portibi Kabupaten Padang
Lawas Utara)

Oleh :
Hamlan

“Implementasi Filosofi Pancamarga Dalam Koordinasi Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan”

(Studi kasus di Pemerintah Kabupaten Bandung)

Oleh :

Dr. Drs, Engkus, SE., M.Si.

ABSTRACT

The main problem in the research is the Coordinating in the regency of Bandung west java province is low. It's thought to have been caused by the implementation of Panca Marga philosophy not done optimally yet. Etymologically that Panca Marga Philosophy consist of two words, Panca is five and marga is way, thus Panca Marga is five ways in management for coordinating. The Panca Marga Philosophy consist of fiveways are (1).Finalisme,(2).Pragmatisme,(3).Revolusioner,(4).Ambeg Paramaarta, and (5). Teladanisme.

Key Words: *Coordinating, Panca Marga, Finalisme, Pragmatisme, Revolusioner, Ambeg Paramaarta, and Teladanisme.*

1. Pendahuluan

Dengan berkembangnya dunia usaha, maka kegiatan ekonomi dan pembangunan berkembang. Dengan adanya perkembangan tersebut perlu adanya daftar perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut merupakan identitas perusahaan yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

Adanya daftar perusahaan itu sangat penting bagi pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahaan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat, karena daftar perusahaan itu berisi keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha, sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi para pengusaha.

Dalam rangkaian penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan untuk mewujudkan serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian pada khususnya, maka perlu adanya pemerataan di dalam kesempatan berusaha bagi dunia usaha. Hal tersebut merupakan implementasi dari Visi Presiden RI 2014 -2019 yang tercermin dalam Nawacita yang ke tujuh yaitu akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dan dalam Program Aksi Trisakti yang ke 15 yaitu mengembangkan kapasitas perdagangan nasional.

Untuk merealisasi hal tersebut di atas, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang disebut dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan. Undang-Undang ini mempunyai tujuan yang sangat penting baik bagi Pemerintah, pengusaha maupun bagi masyarakat itu sendiri. Bagi

Pemerintah adalah untuk memberikan perlindungan dan pembinaan kepada pengusaha-pengusaha yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka. Selain itu pada akhirnya daftar perusahaan ini merupakan sumber untuk menetapkan wajib pajak. Sedangkan bagi pengusaha adalah untuk mendapatkan kepastian berusaha. Dan bagi masyarakat adalah untuk sumber informasi.

Kemudian lebih jauh lagi menurut Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan ini bahwa perusahaan yang wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan adalah sebagai berikut:

Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. (Undang-undang No. 3 Tahun 1982: Halaman 5).

Lebih lanjut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan :

- Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- Anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut.
- Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induk-induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

- Agen perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
- Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusan yang ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
- Kantor pembantu adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor atau cabangnya.
- Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk di dalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum suatu persekutuan.
- Bentuk usaha lainnya adalah misalnya perusahaan Negara, bentuk-bentuk usaha negara seperti Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum. Perusahaan Daerah sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lain sebagainya. (Buku II Tentang Petunjuk Pengisian Formulir Pendaftaran Perusahaan, 1985: Halaman 8).

Yang dikecualikan dari Wajib Daftar Perusahaan adalah Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan setiap perusahaan kecil perorangan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Perusahaan tersebut diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya sendiri, atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat.
- b. Perusahaan tersebut tidak memerlukan izin usaha.
- c. Perusahaan tersebut benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan sehari-hari pemiliknya. (Buku II Tentang Petunjuk Pengisian Formulir Pendaftaran Perusahaan, 1985: Hal. 9).

Secara terinci yang menjadi sasaran Wajib Daftar Perusahaan adalah seluruh kegiatan ekonomi yang telah dikelompokkan menurut Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) berikut ini :

1. Pertanian, peternakan, kehutanan, perburuan dan perikanan;
2. Pertambangan dan penggalian;
3. Industri pengelolaan;
4. Listrik, gas dan air;
5. Bangunan;
6. Perdagangan besar, eceran dan rumah tangga serta hotel;
7. Angkutan, Penggudangan dan komunikasi;
8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan;
9. Jasa kemasyarakatan, sosial, hiburan dan perorangan;
10. Kegiatan yang belum jelas batasannya. (Buku II Tentang Petunjuk Pengisian Formulir Pendaftaran Perusahaan, 1985: Halaman 25).

Sektor-sektor kegiatan usaha tersebut di atas tidak seluruhnya ada dalam lingkup kewenangan Departemen Perdagangan, akan tetapi ada juga yang di bawah lingkup kewenangan Instansi lain. Dengan demikian dalam pelaksanaan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan perlu adanya usaha kerjasama dengan Instansi lainnya tersebut, agar usaha kerjasama tersebut tidak simpangsiur dan dapat terarah pada tujuan yang diharapkan, maka diperlukan adanya koordinasi.

Dalam pelaksanaan kerja tersebut sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan bahwa penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan tersebut selanjutnya dilakukan oleh unit organisasi Kementerian Perdagangan yang fungsinya sebagai kantor pendaftaran Perusahaan (KPP). Untuk ditingkat pusat adalah Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Cq. Direktorat Bina Usaha Perdagangan, sedangkan di Daerah di Tingkat Provinsi adalah Dinas yang membidangi Perdagangan serta untuk di Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi Perdagangan. Dengan demikian Dinas

yang membidangi Perdagangan di kabupaten/kota mempunyai fungsi yang sangat penting karena merupakan ujung tombak pelaksanaan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan.

Pelaksanaan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan ada beberapa masalah yang dihadapi diantaranya: tidak tercapainya target yang diharapkan. Sebagai contoh dari 14.064 perusahaan yang telah memiliki surat izin usaha Perdagangan (SIUP); hanya sebanyak 3.213 perusahaan yang telah mendaftar, sedangkan target yang diharapkan adalah 100 %. Dengan melihat keadaan tersebut ternyata bahwa pencapaian target kurang berhasil.

Selain itu, timbul masalah kurangnya kesatuan tindakan dalam pelaksanaan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, Suatu Instansi yang mengelola izin suatu sektor/kegiatan usaha seperti yang tercantum dalam klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI), kurang merasa terikat dengan adanya Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Contohnya seorang pengusaha yang telah menyelesaikan izin industri dari Departemen Perindustrian tidak mengetahui serta tidak diberitahu bahwa ada jenis izin lain yang harus diselesaikan. Pengusaha tersebut baru mengetahui bahwa surat Keterangan Izin Perindustriannya harus dilengkapi dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), ketika mengajukan permohonan kredit uang ke Bank.

Masalah lain yang dihadapi adalah kurangnya komunikasi dengan instansi lain yang ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Komunikasi yang berlangsung mengarah pada himbauan tertulis, sedangkan komunikasi lisan yang berupa rapat/pertemuan dengan Instansi lain jarang

dilakukan. Hal ini kurang menunjang pencapaian target Wajib Daftar yang diharapkan.

Kemudian sering pula terjadi bahwa Instansi vertikal lebih mengutamakan pada perintah atau tugas yang datang dari atasannya sendiri, sehingga dalam pelaksanaan tugas yang ada di daerah tidak sinkron dengan pelaksanaan undang-undang Wajib Daftar Perusahaan.

Oleh karena masalah-masalah tersebut di atas, maka Kepala Dinas yang mebidangi Perdagangan di Tingkat kabupaten mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka dalam penulisan ini penulis mengambil judul "IMPLEMENTASI FILOSOFI PANCAMARGA DALAM KOORDINASI PELAKSANAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN".

2. Pembatasan Masalah.

Dalam penulisan paper ini, penulis membatasi masalah pada koordinasi pelaksanaan saja, yaitu pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan dalam rangka meningkatkan pencapaian target pada Dinas yang membidangi Perdagangan di tingkat Kabupaten.

Pembatasan masalah ini disesuaikan dengan filsafat pancamarga dan dimaksudkan agar penulisan paper ini tidak terlepas dari pokok permasalahan sehingga terdapat keserasian antara judul dengan pembahasan ini. Hal ini disebabkan karena koordinasi pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan dalam rangka meningkatkan pencapaian target di Kabupaten Bandung harus dijiwai dan berdasarkan kepada filosofi pancamarga sehingga tidak menyimpang dari moral dan etika

manajemen, sebab koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting.

3. Maksud dan Tujuan Penulisan.

Maksud penulisan ini tiada lain adalah untuk mengkaji implementasi pancamarga dalam koordinasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan .

Sedangkan yang menjadi tujuan penulisan paper ini adalah untuk menambah pengetahuan penulis tentang koordinasi pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan dalam rangka meningkatkan pencapaian target pada Dinas yang membidangi Perdagangan di kabupaten Bandung ditinjau dari segi Filosofi Manajemen.

4. Kajian Pustaka

1). Pengertian dan fungsi koordinasi Dalam Manajemen.

Pengertian Koordinasi.

Secara umum manajemen dapat diartikan sebagai suatu usaha/keterampilan untuk memperoleh hasil melalui kegiatan orang lain dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Agar suatu kegiatan manajemen mengarah pada kesatuan gerak dalam mencapai tujuannya, maka diperlukan koordinasi. Koordinasi merupakan suatu usaha untuk menghasilkan kegiatan yang teratur dan terpadu. Untuk memperjelas uraian tersebut di atas berikut ini dikemukakan beberapa pendapat sarjana. Prof. Dr. H. Arifin Abdulrachman (1978:113), mengatakan bahwa :

Pengkoordinasian adalah kegiatan-kegiatan untuk menertibkan, sehingga segenap kegiatan management maupun kegiatan pelaksanaan satu sama lain tidak simpang siur, tidak berlawanan dan dapat ditujukan kepada titik arah

pencapaian tujuan dengan efisien (ordo-adalah orde = tertib).

Drs. Soewarno Handyaningrat (1986:117) memberikan pengertian koordinasi sebagai berikut:

Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi, untuk mencapai tujuan-tujuannya.

G. R. Terry dalam Winardi (1982:55), mengemukakan:

Koordinasi dapat dinyatakan sebagai sinkronisasi usaha secara teratur yang ditujukan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan dan arah pelaksanaan agar dengan demikian dapat dicapai tindakan-tindakan yang harmonis serta disatukan dalam rangkaian usaha mencapai objektifitas tertentu.

Kemudian Dr. S.P. Siagian MPA (1982:110)., mengemukakan bahwa :

Koordinasi adalah suatu proses pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Suatu kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi dengan cara yang seefisien mungkin.

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas ada beberapa hal yang penting diantaranya: bahwa koordinasi memerlukan adanya usaha pengaturan hubungan tata kerja dari masing-masing satuan kerja/unit organisasi. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan dari masing-masing satuan kerja tersebut tidak simpang siur, tidak berlawanan dengan tujuan bersama. Dengan kata lain kegiatan manajemen tersebut harus terintegrasi dan sinkron dengan tujuan organisasi.

Dari pendapat para sarjana di atas bahwa hubungan kerjasama tersebut harus menggunakan cara yang efisien. Cara disini diartikan bahwa dalam mengkoordinasikan seluruh orang dan kegiatannya menggunakan teknik, prinsip dan alat koordinasi. Karena dalam menggunakan cara itu harus efisien, maka dalam menggunakan teknik, prinsip serta alat koordinasi tersebut harus pula efisien, tepat sesuai dengan kebutuhan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka koordinasi merupakan suatu usaha mengarahkan, mengintegrasikan orang-orang beserta tugasnya agar tidak terjadi kesimpangsiuran, bentrokan, kemacetan dan kekosongan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Sebelum penulis uraikan fungsi koordinasi dalam manajemen, terlebih dahulu akan diuraikan tujuan koordinasi dalam manajemen. Dari uraian terdahulu secara umum bahwa tujuan koordinasi itu agar seluruh kegiatan manajemen tidak simpangsiur, dengan kata lain kegiatan tersebut harus teratur terintegrasi. Untuk lebih jelasnya kita lihat pendapat Prof. Dr. H. Arifin Abdulrachman (1978:115) yang mengatakan bahwa tujuan koordinasi dapat dibedakan menjadi :

- a. Tujuan koordinasi adalah sama dengan tujuan management, koordinasi adalah alat untuk management.
- b. Tujuan koordinasi adalah untuk mencegah kesimpangsiuran serta untuk mengarahkan, sehingga setiap kegiatan yang dikoordinasikan itu dapat mencapai tujuannya masing-masing dengan aman dan berhasil.

Dari dua tujuan di atas ternyata bahwa pertama, tujuan koordinasi itu sama dengan tujuan manajemen. Seperti telah diuraikan terdahulu bahwa manajemen itu merupakan keterampilan untuk

mempe
sini, jik
dengan
koordin
masing-
S
koordin
seluruh
berhasil
D
koordin
melalui
kegiatan
2).Fung
M
para sar
bahwa k
pula yar
manajer
fungsi n
yang ber

L
fungsi-fu

memperoleh hasil melalui kegiatan orang lain. Kegiatan orang lain di sini, jika dihubungkan dengan koordinasi maka kegiatan tersebut sama dengan kegiatan-kegiatan dari tiap-tiap unit organisasi. Jadi jelas tujuan koordinasi yang pertama adalah untuk memperoleh hasil dari kegiatan masing-masing unit organisasi.

Sedangkan yang kedua dari pendapat di atas bahwa tujuan koordinasi untuk mencegah kesimpangsiuran dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dengan aman dan berhasil.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa tujuan koordinasi dalam paper ini adalah untuk memperoleh suatu hasil melalui kegiatan masing-masing unit organisasi serta agar kegiatan-kegiatan tersebut tidak simpangsiur, terarah pada tujuan bersama.

2). Fungsi koordinasi dalam Manajemen.

Mengenai fungsi koordinasi dalam manajemen sampai sekarang para sarjana belum mempunyai kata sepakat. Ada yang berpendapat bahwa koordinasi bukan merupakan salah satu fungsi manajemen, ada pula yang berpendapat bahwa koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen. Yang berpendapat bahwa koordinasi bukan salah satu fungsi manajemen diantaranya G. R. Terry dalam Moekijat (1984:206), yang berpendapat bahwa fungsi manajemen terdiri dari :

1. Planning (Perencanaan);
2. Organizing (Pengorganisasian);
3. Actuating (Penggerakan);
4. Controlling (Pengawasan, Pengontrolan).

Lebih lanjut G.R. Terry mengatakan bahwa jika penerapan fungsi-fungsi manajemen (POAC) secara baik akan menghasilkan

koordinasi yang baik pula dengan sendirinya. (Dikutif dari Drs. Melayu Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, 1986: Halaman 85).

Dari pendapat di atas bahwa koordinasi itu bukan merupakan salah satu fungsi manajemen karena menurut G. R. Terry dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen tersebut dengan baik akan menghasilkan koordinasi yang baik. Selain pendapat tersebut di atas ada pula yang berpendapat bahwa koordinasi itu merupakan salah satu fungsi manajemen, sarjana yang berpendapat demikian diantaranya : Henry Fayol dalam S.P. Siagian (1982:103), yang membagi fungsi manajemen sebagai berikut:

1. Planning (Perencanaan);
2. Organizing (Pengorganisasian);
3. Commanding (Pemberian komando);
4. Coordinating (Pengkoordinasian);
5. Controlling (Pengawasan).

Kemudian Luther Gullick dalam Siagian (1982:104), mengemukakan dalam "paper on The Science Of Administration" berikut ini :

1. Planning (Perencanaan);
2. Organizing (Pengorganisasian);
3. Staffing (Pengadaan Tenaga Kerja);
4. Directing (Pemberian bimbingan);
5. Coordinating (Pengkoordinasian);
6. Reporting (Pelaporan);
7. Budgeting (Penganggaran).

Dari pendapat dua sarjana di atas, bahwa koordinasi itu merupakan salah satu fungsi manajemen. Mereka memasukan koordinasi ke dalam fungsi manajemen ini menunjukan betapa pentingnya koordinasi dalam manajemen, dan semua tindakan harus

ditujukan serta memberikan sumbangan kerjanya pada tujuan bersama. Semua orang, kegiatannya dan lain-lain harus dikoordinasikan. Setiap pekerjaan yang simpangsiur harus dielakan. Dengan demikian koordinasi itu merupakan salah satu fungsi organik/fungsi dasar manajemen yang mutlak harus dijalankan dalam proses manajemen. Dann Sugandha (1982:42) mengemukakan pendapatnya tentang fungsi koordinasi ini sebagai berikut :

Fungsi koordinasi ini demikian pentingnya apalagi bila administrasi harus berjalan sebagai suatu sistem, sebagai satu kesatuan yang bulat dari bagian-bagian (sub-sistem) yang saling berhubungan, saling menunjang dan saling bergantung agar administrasi berjalan mencapai tujuan.

Dari Pendapat sarjana di atas, dapat dikatakan bahwa dalam usaha kerjasama pada proses administrasi diperlukan keserasian gerak dalam semua hubungan kegiatan yang merupakan suatu sistem.

Dari uraian-uraian tersebut di atas ternyata koordinasi itu sangat penting dan penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa koordinasi itu merupakan salah satu fungsi manajemen yang mutlak harus dijalankan dalam proses administrasi.

3).Pengertian Filososofi.

Filsafat berasal dari bahasa arab "Falsafah" sedangkan kata falsafah itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu Filosofi atau Philosophy.

Filosofi atau Philosophy tersiri dari dua kata yaitu Philos dan Sophos. Philos artinya cinta, sedangkan sophos berarti kebijakan atau lebih tepatnya kebenaran. Dengan demikian maka pengertian filosofi menurut etimologis adalah cinta akan kebenaran.

Dalam perkembangan selanjutnya filosofi dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan sebagai berikut :

1. Penggolongan berdasarkan masalah-masalah filosofi;
2. Penggolongan berdasarkan obyek filosofi;
3. Penggolongan berdasarkan para filsuf.

Untuk lebih jelasnya penggolongan tersebut di atas dapat diuraikan berikut ini :

2.1. Berdasarkan masalah filosofi, maka akan kita temukan 3 masalah filosofi yaitu :

- masalah purwa causa;
- masalah hakekat objek;
- masalah tujuan akhir objek.

Masalah purwa causa adalah masalah sebab pertama, maksudnya adalah bahwa semua fenomena apa saja yang ada di dunia ini pasti berasal dari suatu sebab yang merupakan sebab dari segala sebab. Terdapat bermacam-macam purwa causa, yaitu: Materialisme, psyconomisme, vitalisme dan theologi.

Masalah hakekat objek adalah mencari kebenaran dari hakekat fenomena. Dari sini terlahir beberapa aliran filosofi seperti aliran realisme, transendentalisme, rasionalisme dan eksistensialisme.

Mengenai tujuan akhir dari objek, berbeda antara satu dengan yang lainnya sehingga terdapat beberapa aliran filosofi seperti humanisme, egoisme, altruisme, pragmatisme, finalisme dan epikurisme.

2.2. Penggolongan berdasarkan objek filsafat terdapat 3 golongan filosofi yaitu:

- a. Filosofi alam;
- b. Filosofi sosial;

c. Filosofi agama.

2.3. Penggolongan berdasarkan kebangsaan filsuf, menimbulkan beberapa aliran filosofi sesuai dengan kebangsaan filsuf, misalnya filosofi Indonesia, filosofi Jerman, filosofi Perancis, filosofi Yunani dan lain sebagainya.

4).Pancamarga Sebagai Filosofi Manajemen.

Pancamarga terdiri dari dua kata yaitu "panca" yang berarti lima "marga" yang berarti jalan. Jadi dengan demikian pancamarga merupakan filosofi yang terdiri dari lima jalan dan merupakan satu kesatuan.

Kelima jalan tersebut adalah :

1. Finalisme;
2. Pragmatisme;
3. Revolusioner;
4. Ambeg Paramarta;
5. Teladanisme.

4.1. Finalisme

Merupakan filosofi yang mengajarkan bahwa dalam segala pelaksanaan kegiatan manajemen harus ditentukan terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan. Setelah itu dibuat tata kerja dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

Agar tujuan tersebut dapat dicapai, maka dalam membuatnya harus jelas, realistis, tidak samar-samar. Hal ini penting karena dengan tujuan yang jelas maka kegiatan manajemen dapat dilaksanakan secara terarah. Akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidaklah berarti pencapaian tujuan tersebut dengan menghalalkan segala macam

cara. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku, misalnya di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku, misalnya di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila.

4.2. Pragmatisme.

Filosofi pragmatisme mengajarkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pimpinan/manajer harus bersifat praktis artinya dapat dimengerti dan dapat dilaksanakan, sehingga dikenal bahwa pimpinan yang baik adalah pimpinan yang dapat membuat keputusan-keputusan yang praktis.

4.3. Revolusioner.

Filosofi ini mengajarkan bahwa dalam setiap organisasi, baik organisasi Negara maupun organisasi swasta, pimpinan harus mau dan mampu melakukan perubahan secara cepat dan bersedia meninggalkan ketentuan-ketentuan lama yang sudah tidak sesuai lagi.

Akan tetapi dalam melakukan perubahab-perubahan ini senantiasa mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku, hal ini penting untuk menjaga agar tidak bergeser seperti ajaran anarchi yang senantiasa mengesampingkan peraturan-peraturan sehingga dapat menimbulkan dampak yang negatif.

4.4. Ambeg Paramarta

Filosofi ini mengajarkan bahwa dalam segala pelaksanaan kegiatan manajemen senantiasa harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki baik dalam bentuk biaya, tenaga kerja, peralatan dan lain sebagainya.

Oleh karena itu harus disusun skala prioritas, kegiatan-kegiatan yang benar-benar perlu serta mampu untuk dilaksanakan harus didahulukan.

4.5. Teladanisme

Filosofi ini menekankan bahwa seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi bawahannya, baik dari segi perilaku, disiplin kerja, perhatian pada bawahan dan sifat serta perkataannya.

Teladan yang dimaksud dalam hal ini adalah teladan dalam arti hal-hal yang positif yaitu yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan sesuai dengan aturan-aturan agama.

Dengan diterapkannya filosofi Pancamarga dalam setiap pelaksanaan kegiatan manajemen, maka dapat diharapkan pelaksanaan kegiatan manajemen tersebut akan berhasil dengan berdaya guna dan berhasil guna.

5. Pembahasan

Ada berbagai usaha yang dilakukan pada Dinas yang membidangi Perdagangan di kabupaten Bandung untuk mencapai target yang ditetapkan.

Dalam usaha mencapai tersebut, meskipun pada prinsipnya merupakan tanggungjawab Pemerintah, khususnya Dinas yang membidangi Perdagangan, namun dalam pelaksanaannya memerlukan partisipasi dari berbagai pihak, baik dari Dinas yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, maupun dari masyarakat itu sendiri.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang ini hubungan kerjasama antara kantor Departemen Perdagangan dengan Instansi lain yang ada hubungannya erat sekali, karena kontribusi dari masing-masing Instansi tersebut sangat dibutuhkan.

Dinas terkait yang berhubungan dalam pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan anantara lain:

- a. Pemerintah Kabupaten Bandung termasuk di dalamnya Dinas-Dinas Daerah;
- b. Seluruh Bank Cabang di Kabupaten Bandung;
- c. Pengadilan Negeri Bandung.

Berdasarkan hal tersebut di atas, ternyata liputan kerjasama antara Dinas yang membidangi Perdagangan di kabupaten Bandung dengan tersebut lainnya sangat luas, dengan demikian agar usaha kerjasama tersebut tidak simpangsiur, terintegrasi dan terarah pada tujuan yang hendak dicapai maka diperlukan koordinasi.

Koordinasi yang dilaksanakan pada Dinas yang membidangi Perdagangan di kabupaten Bandung adalah koordinasi intern dan koordinasi ekstern, koordinasi intern ini dilaksanakan antar seksi di lingkungan Dinas yang membidangi Perdagangan sendiri. Sedangkan koordinasi ekstern dilaksanakan antara Dinas yang membidangi Perdagangan dengan Instansi lain yang berhubungan, yang terwujud dalam jalinan kerjasama dalam penyelesaian/pemberian izin kepada para pengusaha sesuai dengan lingkup kewenangan Instansi vertical tersebut. Misalnya dengan Bank, Bank tersebut tidak dapat mengabulkan permohonan kredit uang kepada para pengusaha, bilamana tidak melengkapi persyaratan dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Dinas yang membidangi Perdagangan. Dari kedua bentuk koordinasi yang menjadi obyek penelitian penulis adalah bentuk koordinasi yang kedua yaitu koordinasi ekstern yang bersifat fungsional.

Ada beberapa tahapan yang dilaksanakan pada Dinas yang membidangi Perdagangan di Kabupaten Bandung untuk mengkoordinasikan setiap unit organisasi yang berhubungan. Tahapan tersebut diantaranya: mengadakan rapat perencanaan koordinasi pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan. Kemudian koordinasi dilaksanakan berdasarkan pada lingkup kewenangan tiap organisasi yang berhubungan. Dan terakhir mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan. Dengan lain perkataan usaha-usaha tersebut dilaksanakan melalui beberapa proses. Proses tersebut adalah perencanaan, pelaksanaan serta melalui proses penilaian (evaluasi).

Jalanan koordinasi pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan antara Dinas yang membidangi Perdagangan di kabupaten Bandung dengan Instansi lainnya yang berhubungan kurang berjalan lancar.

Koordinasi yang berjalan selama ini mengarah pada komunikasi yang berupa himbauan tertulis terhadap Instansi lainnya yang berhubungan, sedangkan komunikasi lisan yang berupa pertemuan/rapat dinas belum pernah dilaksanakan pada tahap pelaksanaan. Hal ini kurang menunjang pencapaian target Wajib Daftar Perusahaan yang diharapkan. Hal tersebut bersumber pada terbatasnya dan tenaga pelaksana baik untuk pengolahan maupun untuk koordinasi pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan.

Dalam tahap pelaksanaan, pertemuan/rapat dinas antara Dinas yang membidangi Perdagangan di kabupaten Bandung dengan Instansi lainnya sangat penting, karena suatu hambatan yang dihadapi akan lebih mudah dan lebih cepat diketahui dan dicari alternatif pemecahannya, dengan demikian akan menunjang kelancaran

pelaksanaan wajib daftar perusahaan yang akhirnya akan mempercepat pencapaian target.

6. Penerapan Filosofi Pancamarga terhadap koordinasi pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan dalam rangka meningkatkan pencapaian target Kabupaten Bandung.

Pada dasarnya penerapan filosofi pancamarga terhadap koordinasi pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan dalam rangka meningkatkan pencapaian target pada Dinas yang membidangi Perdagangan di Kabubapten Bandung telah dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari unsur-unsur filosofi pancamarga yang diterapkan dalam koordinasi pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan tersebut berikut ini:

a. Finalisme.

Dalam usaha mengkoordinasikan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi Perdagangan Kabupaten Bandung yang pertama kali yaitu dalam tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini seluruh Instansi yang berhubungan diberi penjelasan bahwa target yang dikehendaki sampai dengan akhir tahun anggaran adalah 100 %. Dari target yang ditetapkan tersebut masing-masing Instansi yang berhubungan akan mengetahui sasaran yang hendak dicapai secara bersama-sama.

Dengan demikian dengan ditetapkannya target yang hendak dicapai, maka Dinas yang membidangi Perdagangan dalam usaha koordinasi tersebut menerapkan teknik-teknik dan prinsip-prinsip koordinasi yang dianut.

b. Pragmatisme.

Sebagai implementasi dari tujuan yang hendak dicapai maka Kepala Kantor Departemen Perdagangan dalam pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan menuangkan hubungan tata kerja ke dalam suatu pedoman untuk Instansi yang berhubungan dengan cara yang praktis, artinya disesuaikan dengan keadaan lingkup kewenangan Instansi yang berhubungan. Hal ini dilakukan agar hubungan kerjasama yang berlangsung dengan instansi itu dapat berjalan lancar, oleh karena itu aspek pragmatisme sangat berguna berhubung tidak semua Instansi yang berhubungan tersebut mempunyai daya nalar dan pemahaman yang sama dalam menerima suatu tugas.

c. Revolusioner.

Mengenai aspek revolusioner yang terjadi pada Dinas yang membidangi Perdagangan di Kabupaten Bandung diterapkan dengan melihat situasi serta kondisi yang ada. Hal ini dilakukan berhubung dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan di Kabupaten Bandung ini melibatkan Instansi lain, dengan demikian perubahan-perubahan yang dilaksanakan harus dibicarakan dengan pihak-pihak yang berhubungan dalam koordinasi pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan, sehingga perubahan-perubahan kebijaksanaan atau usaha kerjasama yang dilakukan dalam rangka koordinasi bias diterima oleh semua pihak.

d. Ambeg Paramarta.

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bandung dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan senantiasa mengutamakan hal-hal yang lebih penting baik ditinjau dari segi tenaga, biaya maupun waktu untuk melaksanakan Wajib Daftar

Perusahaan. Begitu pula dalam hubungannya dengan instansi lain dengan jalan mengadakan komunikasi baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pada tahap evaluasi. Dengan jalan komunikasi tersebut akan melahirkan keharmonisan kerja antara Dinas Perdagangan dengan Instansi lainnya yang berhubungan, sehingga terdapat saling membantu, saling mengisi dan saling melengkapi yang merupakan tujuan diadakannya koordinasi tersebut.

e. Teladanisme

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bandung dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan melakukan usaha yang sungguh-sungguh dengan cara memantau seluruh kegiatan yang berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar menjadi pendorong bagi pihak-pihak yang dikoordinasikan supaya melakukan usaha yang sama, sehingga tujuan koordinasi dapat tercapai dengan baik. Dengan adanya pendorong dari pihak Dinas Perdagangan, maka pihak-pihak yang dikoordinasikan akan dengan sadar dan rela melakukan kerjasama ini.

Demikianlah pelaksanaan filosofi pancamarga dalam koordinasi pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan dalam rangka meningkatkan pencapaian target di kabupaten Bandung.

7. Kesimpulan

Dari Uraian-uraian yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Koordinasi pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan yang dilaksanakan oleh kepala Dinas Perdagangan kabupaten Bandung dalam rangka meningkatkan pencapaian target kurang berdasarkan pada teknik-teknik dan prinsip-prinsip koordinasi yang tepat. Hal ini diakibatkan

oleh berbagai hambatan yang menjadikankoordinasi pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan terhambat, sehingga target yang diharapkan tidak tercapai.

2. Pancamarga filosofi manajemen yang terdiri dari finalisme, pragmatisme, revolusioner, ambeg paramarta dan teladanisme, secara bertahap sudah diterapkan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan dan selaku koordinatornya adalah kepala Dinas Perdagangan kabupaten Daerah Bandung dilaksanakan secara praktis dan sederhana disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.
3. Filosofi pancamarga yang diterapkan secara konsekuen dapat membantu terhadap efektifitas kerja, karena filosofi pancamarga memberikan pandangan terhadap manajemen mengenai tindakan yang dapat dilakukan agar tujuan dapat dicapai sesuai dengan rencana.

Demikianlah kesimpulan yang dapat penulis kemukakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrachman, Arifin.1978. **Kerangka Pokok-pokok Management Umum**, Jakarta, Ichtiar Baru Van Houve.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.2014.**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional**. Jakarta.
- ,1973. **Filosofi dan Etika Management**, Jakarta, Unija Press.
- Kementerian Perdagangan RI.,1985. **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan**, Jakarta,
- ,1985. **Buku II Tentang Petunjuk Pengisian Pendaftaran Perusahaan**, Jakarta.
- Handyaningrat, Soewarno.1986.**Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional**, Jakarta, PT. Gunung Agung.
- Siagian, Sondang P.1982.**Peranan Staf Dalam Management**. Jakarta.PT. Gunung Agung.
- ,1982. **Filsafat Administrasi**, Jakarta, PT. Gunung Agung,
- Sugandha, Dann.1984.**Koordinasi sebagai Pemersatu Gerak Dalam Proses Administrasi**, Bandung, Ilham Jaya.
- Winardi.1982. **Azas-Azas Management**, Bandung, Alumni.